



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: <b>IV (Empat).</b>
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: <b>Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Rabu, 29 Maret 2023</b>
Pukul	: <b>15.00 – Selesai</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM./Wakil Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyerahan Laporan Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.</li><li>2. Penjelasan mengenai Episode 23 Merdeka Belajar (Buku Bacaan untuk Literasi).</li><li>3. Evaluasi Kebijakan Vokasi (Merdeka Belajar Episode 8 dan 11) dan Perpres No.68 Tahun 202 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.</li><li>4. Perkembangan Seleksi Guru PPPK.</li></ol>
Hadir Pemerintah	: 37 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI. : <b>Nadiem Anwar Makarim, Mendikbudristek RI beserta jajarannya.</b>

## I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 15.27 WIB oleh **Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM.** Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbudristek RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Terhadap penjelasan Mendikbudristek RI mengenai isu bidang pendidikan dan kebudayaan, Komisi X DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:

1. Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI agar implementasi kebijakan penyediaan buku bacaan untuk literasi (merdeka belajar episode 23) terintegrasi dengan program literasi yang dilaksanakan oleh K/L lain (Kemendes PDDT RI, Kemenkominfo RI, Kemendagri RI, dan Perpustakaan RI) serta memperhitungkan kebutuhan buku bacaan di perpustakaan sekolah tidak hanya untuk PAUD dan SD, juga untuk SMP, SMA dan SMK. Mengingat alokasi anggaran untuk program ini cukup besar, maka Kemendikbudristek RI segera menetapkan tolok ukur keberhasilan peningkatan literasi sekolah.
2. Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI agar penyediaan buku bacaan untuk literasi di satuan pendidikan diikuti dengan kebijakan penguatan perpustakaan sekolah dan penyediaan pustakawan sekolah yang memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana amanat UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI agar berbagai terobosan kebijakan pendidikan vokasi seperti SMK PK dan Kampus Merdeka Vokasi, agar memperhatikan hak peserta didik yang sedang magang dan harus diikuti dengan program monitoring evaluasi (monev) yang terfokus pada peningkatan mutu lulusan dan keterserapannya dalam DUDIKA.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI agar menindaklanjuti catatan anggota Komisi X DPR RI khususnya terkait penyelesaian permasalahan guru PPPK, dalam RDP tanggal 21 Maret 2023 dan beberapa RDPU dari unsur masyarakat yang disampaikan ke Komisi X DPR RI.
5. Terkait Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI agar substansi kebijakan pendidikan yang akan diterbitkan tidak bertentangan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan melibatkan para pimpinan PTN dan PTS serta memperhatikan setiap masukan dari masyarakat

agar kebijakan pendidikan implementatif dan tidak menimbulkan keresahan.

6. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan revitalisasi dan menguatkan sistem data pokok pendidikan (dapodik), karena dapodik merupakan salah satu dasar pengambilan kebijakan pendidikan.

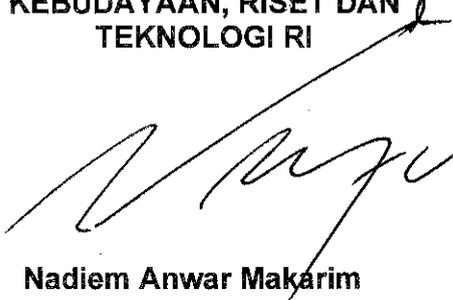
B. Terkait permohonan pembahasan anggaran karena adanya pergeseran anggaran per unit utama dan per program dalam APBN Kemendikbudristek TA 2023, Komisi X DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat akan mengagendakan RDP terlebih dahulu dengan Eselon I Kemendikbudristek RI dalam waktu dekat.

C. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atau data (antara lain data sekolah penggerak dan organisasi penggerak) dari pertanyaan dan catatan yang disampaikan anggota Komisi X DPR RI, paling lambat tanggal 12 April 2023.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.30 WIB

**MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI RI**



**Nadiem Anwar Makarim**

**KETUA RAPAT,**



**Agustina Wilujeng P, SS., MM.**